

**ANALISIS YURIDIS DAN *SIYĀSAH IDARIYAH* TERHADAP
PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM
PENGELOLAAN SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO
(SIPRAJA)
(Studi Kasus Di Kecamatan Sukodono dan Waru)**

SKRIPSI

**Oleh
Muhammad Syamsul Anam
NIM. C94218094**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syamsul Anam
Nim : C94218094
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Dan *Siyāsah Idariyah* Terhadap
Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat
Dalam Pengelolaan Sistem Pelayanan Rakyat
Sidoarjo (SiPraja) (Studi Kasus di Kecamatan
Sukodono dan Waru)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Syamsul Anam

NIM. C94218094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Syamsul Anam** dengan **NIM. C94218094** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 4 Januari 2023

Dosen Pembimbing,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 1989051720150310006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Syamsul Anam
NIM. : C94218094

telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 12 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 1989051720150310006

Penguji II



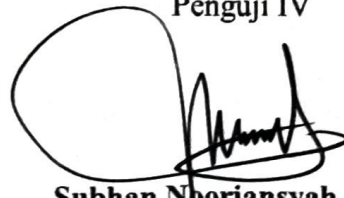
Dr. Ach. Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III



Arif Wijaya, SH, M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Subhan Nporiansyah, M.Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 16 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Subhan Musala'ah, M.Ag.
NIP.196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD SYAMSUL ANAM
NIM : C94218094
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : syamsulanam0208@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENGELOLAAN SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO (SIPRAJA) (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKODONO DAN WARU)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2023

Penulis

(MUHAMMAD SYAMSUL ANAM)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian hukum empiris dengan judul “Analisis Yuridis dan *Siyāsah Idariyah* Terhadap Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Pengelolaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) (Studi Kasus di Kecamatan Sukodono dan Waru).” Permasalahan yang diangkat ialah pertama, bagaimana pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam pengelolaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja). Kedua, bagaimana analisis *Siyāsah Idariyah* terhadap pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam pengelolaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja).

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Bermula mengenai pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam pengelolaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja) dan kemudian data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) menggunakan teknik deskriptif induktif yang selanjutnya akan disusun dengan secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit. Data penelitian diperoleh dari wawancara, observasi dan kajian pustaka yang selanjutnya dianalisis menggunakan kajian *teori fiqh siyāsah idariyah*.

Hasil penelitian ini yang pertama menjelaskan bahwa pengelolaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja) telah sesuai dengan nilai-nilai dalam hal pelayanan publik yaitu mudah, sederhana, murah dan dapat dijangkau, namun pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dalam pengelolaan SiPraja itu sendiri tidak berdasarkan terhadap karakteristik wilayah kecamatan yang diberikan kewenangan. Sehingga bertentangan dengan asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yang mengakibatkan tidak adanya asas kepastian hukum. Kedua, analisis *siyāsah idariyah* menyatakan bahwa menentukan kebijakan dalam Islam harus benar-benar berdasarkan kepentingan masyarakat dan kemauan masyarakat yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan koordinasi antar lini pemerintah harus selaras antara Bupati kepada Camat dan memberikan kemudahan yang bermuara pada pelayanan masyarakat.

Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran hendaknya pelimpahan kewenangan sebaiknya diatur berdasarkan tipologi kecamatan atau memperhatikan karakteristik wilayah tiap kecamatan mengingat setiap wilayah kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Kata Kunci: Pelimpahan Kewenangan, Karakteristik, Kecamatan.

DAFTAR ISI

COVER	i
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Kajian Pustaka	13
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	17
G. Definisi Operasional	18
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN TEORI <i>SIYĀSAH IDARIYAH</i>	28
A. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	28
B. Konsep <i>Siyāsah Idariyah</i>	34
C. Konsep Administrasi Negara Islam.....	36
D. Konsep Pelimpahan Kewenangan	39
E. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	41
F. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Camat	45

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENGELOLAAN SIPRAJA DALAM PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 22 TAHUN 2020	51
A. Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja)	51
B. Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020.....	56
C. Pengelolaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja) di Kecamatan Sukodono dan Waru.....	64
1. Karakteristik Kecamatan Sukodono dan Waru.....	64
2. Pengelolaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo.....	70
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN <i>SIYĀSAH IDARIYĀH</i> TERHADAP PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENGELOLAAN SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO (SIPRAJA)	80
A. Analisis Yuridis Terhadap Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Pengelolaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja).....	80
B. Analisis <i>Siyāsah Idariyāh</i> Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Pengelolaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja).....	87
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Imam. 2000. *Hukum Tata Negara Dalam Takaran Islam, Cet. ke-2*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Mawardi. 1996. *al-aḥkam as-Ṣulṭannīyah wa al-Wilāyah ad-Dīnīyah*. Mesir: Dar al Fikr.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. 1993. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Djazuli. 2007. *Fiqh Siyāsah*. Damaskus: Dar al-Qallam.
- Fakhrur, Amam. (Ketua Pengadilan Agama Surabaya). Interview. Surabaya, August 1, 2018.
- Hamidi, Jazim. “Paradigma Baru Pembentukan Dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik Dan Perda Keterbukaan Informasi Publik).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (July, 2011): 336–62, accessed July 20, 2022, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art3>.
- Hamidi, Jazim. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hapsari, Aprinita Dwisna, and Belinda Ulfa Aulia. “Tipologi Wilayah Peri Urban Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Aspek Fisik, Sosial, Dan Ekonomi.” *Jurnal Teknik ITS* 7, no. 2 (2019): 168-172, accessed August 4, 2022, DOI:[10.12962/j23373539.v7i2.34248](https://doi.org/10.12962/j23373539.v7i2.34248).
- Hidayat, Renir. “Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

(Studi Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.” Tesis, Universitas Medan Area, 2019. Accessed July 12, 2022, <https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/13690/>.

Iqbal Muhammad. 2007. *Fiqh Siyāsah Kontekstual Dokrin Politik Islam*. Jakarta: Yofa Mulia Offset.

Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Kambo, Gustiana A. "Etnisitas dalam Otonomi Daerah." *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hassanudin* Vol. 1 No. 1(January, 2015): 3, accessed July 20, 2022, <https://doi.org/10.31947/politics.v1i1.125>.

Kapitan, Walter Yoakim SinaAma. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis *e- Government* Studi kasus Penyelenggaraan Program e-KTP di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang". Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2019. Accessed July 20, 2022, <http://repository.unpas.ac.id/43936/>.

Kecamatan, Portal Pemerintah. Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Maret 23, 2022. <https://sukodono.sidoarjokab.go.id/> (accessed November 5, 2022).

Kecamatan, Portal Pemerintah. Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Maret 23, 2022. <https://waru.sidoarjokab.go.id/> (accessed November 5, 2022).

Kurniawan, Robi Cahyadi. "Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2017): 582, accessed September 21, 2022, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>.

Kusuma, Riko Eka. “Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” *Yuridika* 28, no. 2 (2016): 125–36, accessed September 21, 2022, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.15>.

Laksana, Agung Wara, Bambang Supriyono, and Sarwono. "Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 3 (2015): 506–17, accessed November 20, 2022, <https://doi.org/10.33366/jisip.v4i3.134>.

Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Manzhur, Ibn. 2005. *Lisan al-Arab*. Mesir: Daral-Shadr.

Marbun, SF. 2001. "Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia" dalam *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Marschall, Melissa J. "Citizen Participztion and The Neighborhood Context : A New Lookat the Co productio of Local Public Goods", *Political Research Quartely* Vol. 57, (July 2, 2016): 231, accessed July 28, 2022, <https://doi.org/10.1177/106591290405700205>.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Masruhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.

Moh Mahfud dan Marbun. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Nadzir, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution. 2008. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nuradhawati, Rira. "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia." *Jurnal Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik* 2, no. 01 (2019): 152-170, accessed July 7, 2022, <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90> 2019-02-19.

- Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat, 2019. Accessed June 2, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121688/perbup-kab-sidoarjo-no-4-tahun-2019>.
- Pramesti, Wulan. "Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik Dalam Islam." *Jurnal Politea*, ISSN 2621-0312, Vol. I No. I (June, 2018): 43-44, accessed November 27, 2022, [DOI: 10.21043/politea.v1i1.4312](https://doi.org/10.21043/politea.v1i1.4312).
- Pricilia, N., & Mursyidah, L. (2021). "The Innovation of Public Service Mini Mall Sukodono District, Sidoarjo Regency." *Jurnal Academia Open: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* 4, no. 1 (2021): 10, accessed January 17, 2023, <https://doi.org/10.21070/acopen.4.2021.2867>.
- Rahmat. 2001. *Teori Politik Islam, Cet. ke-1*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rasyid R. 2002. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Republik Indonesia. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, 2020. Accessed June 2, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146850/perbup-kab-sidoarjo-no-22-tahun-2020>.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, 2018. Accessed August 4, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77921/pp-no-17-tahun-2018>.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, 2016. Accessed August 4, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5739/pp-no-18-tahun-2016>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014. Accessed July 20, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara, 2014. Accessed July 20, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>.
- Rojak, Jeje Abdul. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Saputra, Dema Prayuda. “Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP): Universitas 17 Agustus Surabaya* 7, no. 2 (October 29, 2021): 194-221, accessed January 13, 2023, <https://doi.org/10.30996/jpap.v7i2.4497>.
- Saputra, Wahyu. “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Transparansi Pelayanan Publik Di Jawa Timur.” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 14, no. 01 (2019): 31–48, accessed October 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.37680/adabiya.v14i01.102>.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara, Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UII Press.
- Solechan, Solechan. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (August: 2019): 541-557, accessed October 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardja, Ahmad. 2014. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sukbar. Pelayanan Publik Menurut Islam. November 6, 2015. <https://aceh.tribunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam> (accessed Juli 13, 2022).
- Sukmawati, Xena Mei. "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Terhadap Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Surabaya, 2021. Accessed Mei 2, 2022, <http://digilib.uinsby.ac.id/49074/>.
- Sunarti (Pengadministrasian Umum Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian). *Interview*. Sidoarjo, November 08, 2022.
- Surjaweni, Wiratna. 2004. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tahrir, Hizbut. 2008. *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, alih bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3. Jakarta: HTI-Press.
- Tamwif, Irfan. 2014. *Metode Penelitian*. Surabaya: UINSA Press.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2018. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Wandan, Winda (Staf Pelayanan Kecamatan Sukodono). *Interview*. Sidoarjo, November 08, 2022.
- Wasistiono, Sadu. 2001. *Esensi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. Bandung: Alqaprint.
- Zallun, Qadim. 2002. *Nidhamul Hukmi Fil Islam (Sistem Pemerintahan Islam)*, Terj. M. Maghfur W. Bangil: Al-Izzah.